

PENGANTAR KATA

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya Laporan Kinerja (LKj) KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2018 dapat dirampungkan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo disusun dengan berpedoman pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU//2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban, transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam melaksanakan Program, Kegiatan dan output selang tahun anggaran 2018, sehingga diharapkan kinerja Sekretariat KPU Provinsi dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas tugas kepeiluan dapat terukur dan terevaluasi keberhasilan maupun kekurangan baik secara kelembagaan dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan hingga manfaat yang dirasakan oleh publik.

Disadari bahwa, Laporan Kinerja ini masih memiliki kekurangan dan membutuhkan masukan dari berbagai pihak, dengan komitmen untuk menjadi lebih baik di masa mendatang dalam mewujudkan visi KPU Provinsi Gorontalo, menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Gorontalo, Januari 2019

SEKRETARIS,

ARDIN DANIAL

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat KPU Provinsi dibentuk untuk membantu dan memfasilitasi tugas tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan, khususnya dibidang adminstrasi, keuangan dan kepegawaian. Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo sebagai lembaga yang mengelola administrasi dan anggaran negara, berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) KPU Sekretaris Provinsi Gorontalo yang transparan dan akuntabilitas terhadap kinerja dan anggaran selang tahun 2018.

Laporan Kinerja memuat visi, misi, tujuan, sasaran stratgis yang dijabarkan dalam Indiktor Kinerja Utama (IKU) KPU RI, 7 (tujuh) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja. Hal tersebut dievaluasi dan dianalisis capaian kinerja dapat dikatakan 100% kinerja dan 94,47% pencapaian realisasi anggaran. Laporan kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja anggaran KPU Provinsi Gorontalo kepada publik.

Pada tahun 2018 KPU Provinsi Gorontalo menyelenggarakan tahapan Pemilihan Umum anggota DPR,DPD,DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 serta menyelenggarakan pemilihan kepala daerah Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo tahun 2018

Keberhasilan pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum anggota DPR,DPD,DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di tahun 2018 merupakan kerja keras kita semuanya sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan, Pemerintah daerah dan koordinasi stakeholder pemilu serta partisipasi masyarakat Gorontalo. Tentunya dalam proses pelaksanaannya banyak

kendala yang dihadapi, dari faktor internal kelembagaan maupun luar lembaga KPU Provinsi Gorontalo. Akan tetapi dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki mampu diselesaikan dengan baik. Penguatan internal kelembagaan, bimtek dan evaluasi senantiasa dilakukan sebagai langkah meningkatkan kinerja dan kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

Disamping itu, upaya keras kinerja penyelenggara KPU Provinsi Gorontalo pada tahun 2018 terlihat dari keberhasilan pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, hal ini merupakan kesuksesan kita bersama yang harus kita pertahankan dan lebih baik lagi pada pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI	3
C. STRUKTUR ORGANISASI	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. RENCANA STRATEGIS KPU PROVINSI GORONTALO 2015- 2019	11
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2018	17
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	22
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	26
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	47
BAB IV PENUTUP	54
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
LAMPIRAN 1 : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018	
LAMPIRAN 2 : PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rencana Kinerja Tahunan KPU Provinsi Gorontalo 2018	18
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahunan KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2018	20
Tabel 2.3	Revisi Pagu Anggaran KPU Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2018	20
Tabel 3.1	Indikator Kinerja Utama KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2018 ..	23
Tabel 3.2	sasaran Program dan Indikator Kinerja Program KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2018	25
Tabel 3.3	Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat waktu	28
Tabel 3.4	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 KPU provinsi Gorontalo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019	29
Tabel 3.5	Alur Proses PemuktahiranData dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2019.....	30
Tabel 3.6	Daftar Pemilih Tetap Pada Pilkada Serentak Tahun 2018 Pada Kabupaten Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo	31
Tabel 3.7	Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal yang berlaku pada tahun 2015-2019	33

Tabel 3.8	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu pada tahun 2015-2019	35
Tabel 3.9	Rekap Jumlah PPS dan PPK Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten/Kota Se – Provinsi Gorontalo.....	37
Tabel 3.10	Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai KPU Provinsi Gorontalo Terhadap Standar Kompetensi pada Tahun 2015-2019.....	37
Tabel 3.11	Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	40
Tabel 3.12	Pengukuran Kinerja terhadap Persentase rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU pada Tahun 2015-2019	42
Tabel 3.13	Pengukuran Kinerja Terhadap Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Gorontalo pada Tahun 2015-2019	45
Tabel 3.14	Pengukuran Kinerja Terhadap Reviu Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo pada tahun 2015-2019	46
Tabel 3.15	Realisasi APBN Murni KPU Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2018	47
Tabel 3.16	Perbandingan Pagu dan Realisasi APBN Murni dan Hibah APBD Tahun Anggaran 2015-2018 KPU Provinsi Gorontalo ...	48
Tabel 3.17	Pengukuran Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran KPU Provinsi Gorontalo.....	49

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Tahun 2018	7
Grafik 1.2	Data Golongan dan Kepangkatan KPU Provinsi Gorontalo	8
Grafik 1.3	Jenjang Pendidikan Pegawai Tahun 2018	8
Grafik 1.4	Persentase Pegawai Tahun 2018	9

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sebagai bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu. Sebagai salah satu lembaga konstitusional Independen sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor: 07 Tahun 2017 berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas KPU sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu secara nasional dan lokal.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo bebas dari pengaruh pihak manapun baik internal maupun eksternal organisasi, yang timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Komisi Pemilihan Umum mempunyai fungsi menyelenggarakan pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis.

Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai

pencapaian kinerja KPU Provinsi selama Tahun Anggaran 2018. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2018 tersebut diperbandingkan dengan perjanjian kinerja (performance agreement) Tahun 2018 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja. Dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah

Disamping itu, tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu/pemilihan memberi warna tersendiri terhadap penguatan kelembagaan demokrasi baik dari dimensi infrastruktur politik maupun suprastruktur politik. Kedewasaan berpolitik membawa searah dengan kemajuan demokratisasi sebagai ciri masyarakat yang beradab, yang menghormati nilai nilai kebebasan penghargaan terhadap perbedaan memberikan pendapat, kebebasan memberikan informasi dan menjamin hak - hak konstitusi warga negara.

KPU secara hirarki berpedoman pada kebijakan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Nasional yang pada operasional kerjanya yang dituangkan dalam Rencana Strategi KPU 2015-2019, renstra KPU ini menjadi acuan dan panduan utama bagi perencanaan strategi (Renstra) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Untuk melaksanakan sasaran strategis yang dituangkan dalam perencanaan strategis, maka KPU Provinsi Gorontalo setiap tahunnya melakukan

perencanaan anggaran secara terstruktur dari tingkat pusat sampai masing masing satker kabupaten/kota. Perencanaan anggaran berpedoman pada kebijakan strategis yang telah disusun dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum RI dalam Rencana Strategis (Renstra).

Pada Tahun Anggaran 2018 KPU Provinsi Gorontalo mempunyai 2 (dua) program yang harus dicapai yaitu Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dan program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik. 2 (dua) program ini, terstruktur dalam 9 (Sembilan) kegiatan yang dilaksanakan dalam kurung waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Dalam pelaksanaan kegiatan ditopang dengan sumber daya manusia aparatur yang bekerja di KPU Provinsi Gorontalo dengan dukungan sarana dan prasarana serta konsolidasi organisasi yang terus menerus hingga mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja KPU Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2018.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

1. Kedudukan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di Provinsi. KPU Provinsi bersifat tetap, mandiri dan hirarki dalam

melaksanakan tugas dan kewajiban yang diatur dalam undang serta berperan sebagai koordinator dan fasilitator bagi KPU Kabupaten / Kota diwilayah kerjanya.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, diatur Tugas KPU Provinsi dalam pemilihan umum sebagaimana pasal 15 sebagai berikut:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota;
- d. menerima daftar pemilih dari KPU kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada KPU;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. merekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU kabupaten/kota;
- g. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;

- h. mengumumkan calon anggota DPRD Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- j. mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung kelancaran tugas KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota dibentuk Sekretariat KPU secara berjenjang. Dalam Undang-Undang Nomor 7 diatur secara jelas tugas, wewenang dan kewajiban Sekretariat KPU Provinsi sebagaimana dalam pasal 87 ayat (1), (2), (3) sebagai berikut:

Tugas Sekretariat KPU Provinsi:

- a. Membantu penyusunan Program dan Anggaran Pemilu;
- b. Memberi dukungan teknis administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan

- g. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Sekretariat KPU Provinsi:

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggara pemilu berdasarkan norma, standar prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Sekretariat KPU Provinsi :

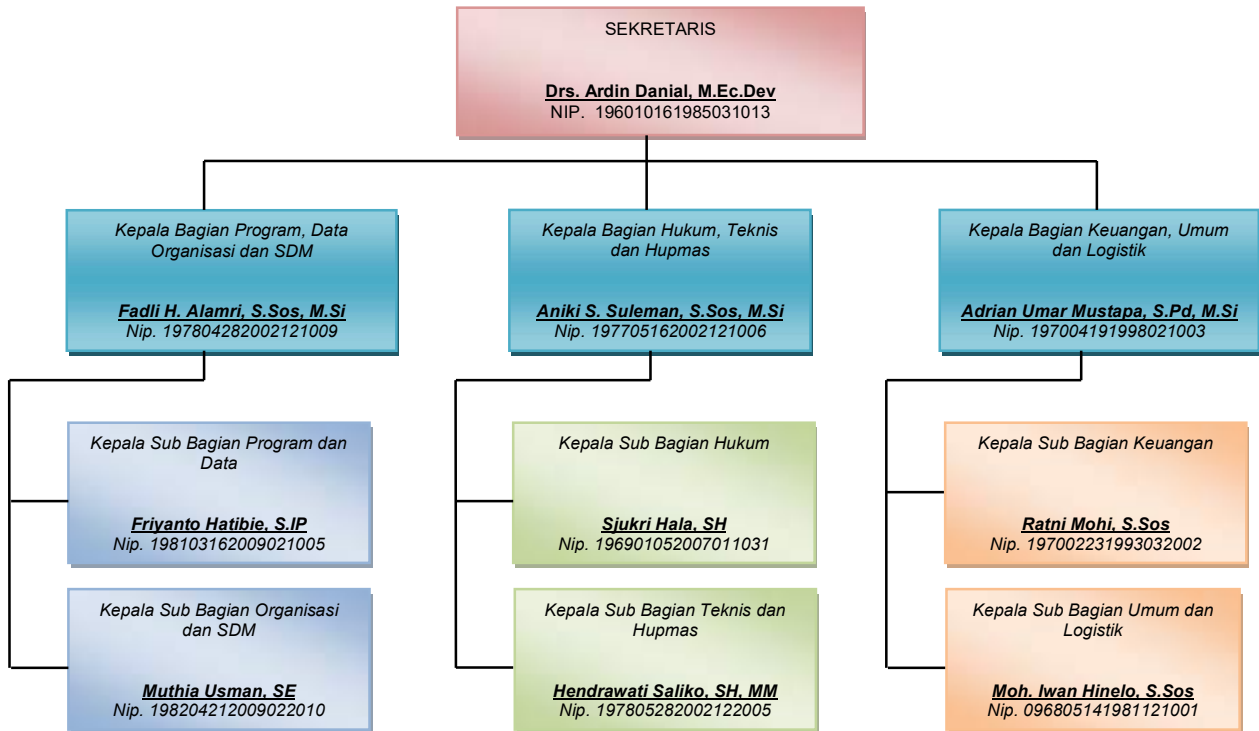
- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan
- b. Memelihara arsip dan dokumen KPU Provinsi
- c. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi

C. STRUKTUR ORGANISASI

1. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

**Grafik 1.1 STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2018**



2. Sumber Daya Manusia

Peningkatan sumber daya manusia baik Adhoc penyelenggara pemilu maupun sekretariat yang mendukung penyelenggaraan pilkada 2018 di dua daerah (Kabupaten Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo) pemilu 2019 dilakukan pembenahan melalui berbagai kegiatan supervisi, monitoring, pelatihan dan bimbingan teknis dalam pengembangan SDM dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan. Di sisilain, khususnya pada jajaran kesekretariat mengisi beberapa jabatan struktural yang dimutasikan atau mengalami pergeseran dari

instansi induk (Pemerintah Daerah) dengan mempertimbangkan kemampuan aparatur negara yang disesuaikan dengan Peraturan yang ada.

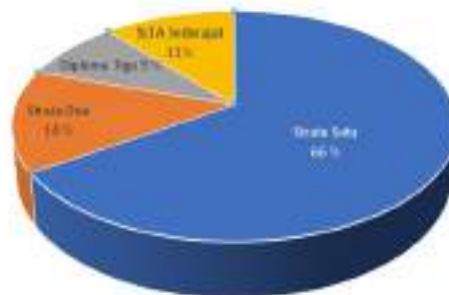
Adapun komposisi SDM di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

Grafik 1.2
Data Golongan dan Kepangkatan KPU Provinsi Gorontalo



Komposisi aparatur sipil negara yang bekerja di sekretariat KPU Provinsi Gorontalo memiliki beragam disiplin ilmu dan jenjang pendidikan seperti grafik dibawah ini

Grafik 1.3 Jenjang Pendidikan Pegawai Tahun 2018



Jenis kepegawaian Aparatur Sipil Negara yang ada di KPU Provinsi Gorontalo terdiri dari pegawai negeri sipil KPU yang diangkat dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI (pegawai organik) dan aparatur sipil negara yang berasal dari Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dipekerjakan / diperbantukan di Instansi KPU. adapun persentase sebagaimana grafik dibawah ini

Grafik 1.4
Persentase Pegawai Tahun 2018



D. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan laporan kinerja KPU adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan laporan kinerja

IKHTISAR EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok pokok isi dari seluruh laporan kinerja

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tupoksi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Renstra, Rencana Kinerja dan PK. Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja dalam rangka pencapaian target dan visi misi KPU.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Setjen KPU serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KPU PROVINSI GORONTALO 2015 - 2019



KPU Provinsi Gorontalo sebagai bagian dari satuan kerja perangkat pusat yang ada di daerah membuat rencana strategis dengan mengacu pada Rencana Strategi yang telah disusun oleh Komisi Pemilihan Umum RI. Renstra KPU Provinsi Gorontalo memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dan pendanaan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja (satker) yang ada di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor : 74.a/HK.03 - Kpts/Prov/VI/2018 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo 2015-2019.

Adapun visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Visi

Adapun visi KPU Provinsi Gorontalo 2015-2019 adalah Menjadi Penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang luber dan jujur.

Penjabaran visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi nasional dan agenda prioritas nasional nawa cita, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

2. Misi

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo menetapkan 5 (lima) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama kurun waktu 2015 – 2019 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabilitas, serta aksesibel
- b. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme Penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara pemilu
- c. Menjalankan regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat; dan
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

3. Tujuan KPU Provinsi Gorontalo

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo adalah:

- a. Terwujudnya lembaga KPU Provinsi Gorontalo yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- b. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel; dan
- c. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia khususnya Provinsi Gorontalo.

4. Indikator Kinerja Utama

Sebagai wujud dari bentuk akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, maka Indikator Kinerja Utama KPU Provinsi Gorontalo sesuai Indikator Kinerja KPU RI sebagaimana dituangkan dalam keputusan KPU Nomor 74.a/HK.03- Kpts/Prov/VI/2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Adapun indikator kinerja utama sebagaimana berikut:

- 1) Persentase KPU Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku
- 2) Persentase partisipasi pemilih KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/Pemilihan
- 3) Persentase partisipasi pemilih Perempuan KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/Pemilihan

- 4) Persentase partisipasi pemilih Disabilitas KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/Pemilihan
- 5) Persentase pemilih KPU Provinsi Gorontalo yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya
- 6) Persentase KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik
- 7) Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan
- 8) Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU
- 9) Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Gorontalo
- 10) Reviu Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo

Untuk menjabarkan IKU KPU Provinsi Gorontalo dicapai melalui sasaran strategis berupa program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja dan anggaran tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo

5. Sasaran Strategis Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo

Sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai kurun waktu 2015-2019 adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP).

Secara khusus, sasaran-sasaran strategis Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan KPU Provinsi Gorontalo yang demokratis:

- a. Persentase KPU Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku;
- b. Persentase Partisipasi Pemilih KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu / Pemilihan;



- c. Persentase partisipasi pemilih perempuan KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu / Pemilihan;
 - d. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu / Pemilihan;
 - e. Persentase pemilih KPU Provinsi Gorontalo yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
2. Meningkatnya Pemilu / Pemilihan KPU Provinsi Gorontalo yang Aman, Damai, Jujur dan Adil dengan indikator kinerja:
- a. Persentase KPU Provinsi Gorontalo, dan KPU Kabupaten / Kota yang melaksanakan Pemilu / Pemilihan tanpa konflik;
 - b. Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan;
 - c. Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;
3. Meningkatnya Kapasitas Lembaga KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan, dengan indikator:
- a. Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Gorontalo;
 - b. Reviu Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo.

B. RENCANA KINERJA KPU PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018

Setiap tahun anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo akan melaksanakan 3 (tiga) program dan 9 (Sembilan) kegiatan yang akan dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran. Adapun program-program dan kegiatan yang

akan dilaksanakan oleh KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2018 mempunyai rencana kinerja tahunan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Rencana Kinerja Tahunan KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2018

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1		2	3	4
1	<u>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya</u>	Terwujudnya Data Pemilih KPU Provinsi Gorontalo yang Terkini	Persentase KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
		Meningkatnya Kapasitas SDM KPU Provinsi Gorontalo yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai KPU Provinsi Gorontalo terhadap Standar Kompetensi	90%
		Terwujudnya Dukungan Logistik KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Gorontalo	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Gorontalo	Baik
			Reviu Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo	Baik
2	<u>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU</u>	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Gorontalo	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai KPU Provinsi Gorontalo yang berfungsi dengan Baik	49%

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1		2	3	4
3.	<u>Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik</u>	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan KPU Provinsi Gorontalo Sesuai Jadwal	Persentase KPU Provinsi Gorontalo KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
		Terwujudnya Keputusan KPU Provinsi Gorontalo serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persentase keputusan yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%

C. PERJANJIAN KINERJA KPU PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018

Dalam rangka mengaktualisasikan rencana kerja tahunan telah dijabarkan dalam perjanjian kinerja KPU Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2018, sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahunan KPU Provinsi Gorontalo 2018

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Data Pemilih KPU Provinsi Gorontalo yang Terkini	Persentase KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
2	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan KPU Provinsi Gorontalo Sesuai Jadwal	Persentase KPU Provinsi Gorontalo KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
3	Terwujudnya Dukungan Logistik KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
4	Meningkatnya Kapasitas SDM KPU Provinsi Gorontalo yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai KPU Provinsi Gorontalo terhadap Standar Kompetensi	90%
5	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Gorontalo	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai KPU Provinsi Gorontalo yang berfungsi dengan Baik	49%
6	Terwujudnya Keputusan KPU Provinsi Gorontalo serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persentase keputusan yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%
7	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Gorontalo	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Gorontalo	Baik
		Reviu Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo	Baik

PROGRAM

ANGGARAN

1.Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya

Rp. 11.143.365.000,-

2.Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Rp. 4.478.908.000,-

Bahwa dalam perjanjian kinerja telah dilakukan perubahan karena penambahan anggaran sebagaimana dalam matriks dibawah ini :

Tabel 2.3 Revisi Pagu Anggaran KPU Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2018

NO	URAIAN DIPA	PAGU AWAL	PAGU REVISI	SELISIH (+/-)	KETERANGAN
1	DIPA AWAL	15.622.273.000	-	-	Pagu Awal DIPA APBN T.A 2017
2	DIPA REVISI 1	15.622.273.000	15.622.273.000	-	-
3	DIPA REVISI 2	15.622.273.000	15.715.325.000	93.052.000	Ketambahan Anggaran, Revisi Eselon I
4	DIPA REVISI 3	15.715.325.000	16.674.180.000	958.855.000	Ketambahan Anggaran, Revisi Eselon I
5	DIPA REVISI 4	16.674.180.000	17.489.352.000	815.172.000	Ketambahan Anggaran, Revisi Eselon I

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA



Penyelenggaraan pemilu 2019 di tahun 2018, KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya senantiasa bekerja dengan standar atau peraturan yang mengacu pada pelaksanaan teknis setiap tahapan pemilu serentak yang pertama kali memilih Presiden dan wakil Presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD pada tanggal 17 april 2019.

Pemilu yang merupakan program nasional yang dilaksanakan setiap kurun waktu lima tahun yang tujuannya memilih para pemimpin secara nasional dan daerah secara demokratis, tertib dan aman yang sesuai dengan konstitusi, maka KPU sampai jajaran ke bawah berupaya dengan seluruh sumber daya yang

dimiliki menyukseskan seluruh tahapan Pemilu, tahapan pemilu yang sudah terlaksana pada tahun 2018 telah dilalui dengan aman dan tertib.

Pada tahun anggaran 2018 KPU Provinsi Gorontalo telah melaksanakan program dan kegiatan serta capaian kinerja yang secara garis besar sasaran utama yang harus dicapai dapat digambarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU). KPU Provinsi Gorontalo telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan merujuk kepada sasaran strategis yang tercantum dalam rencana strategis KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019.

Adapun yang menjadi capaian indikator kinerja utama (IKU) KPU Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama KPU Provinsi Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase KPU Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	100%
2	Persentase Partisipasi Pemilih KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/Pemilihan	77,50 %	82,34 %	106 %
3	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/Pemilihan	75 %	84,16 %	112%
4	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/Pemilihan	75 %	77,15%	103%
5	Persentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	60%	82.34%	137%
6	Persentase KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	95%	95%	100%

7	Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%	0,48%	100%
8	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Provinsi Gorontalo	86%	100%	116%
9	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Gorontalo	Baik	Cc	Cc
10	Reviu Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo	Baik	Cc	Cc

Bahwa dalam mengukur target indikator kinerja utama (IKU) merujuk pada target rata-rata nasional yang akan dicapai oleh KPU sebagai kantor pusat, dimana Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga hirarki yang terstruktur dari Komisi Pemilihan Umum RI, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. KPU Provinsi sebagai koordinator dan KPU Kabupaten/Kota bertindak sebagai pelaksana kegiatan langsung dilapangan dan dibantu oleh badan penyelenggara adhoc (PPK dan PPS). Selain itu melihat pada perbandingan kinerja tahun sebelumnya dan kinerja pada tahun berjalan serta analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan ataupun penurunan kinerja dan alternative solusi yang dilakukan.

Tabel 3.2
Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program KPU Provinsi Gorontalo
Tahun 2018

NO	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Sasaran Program 1. Terwujudnya Data Pemilih KPU Provinsi Gorontalo yang Terkini				
1	Persentase KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%
Sasaran Program 2. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan KPU Provinsi Gorontalo Sesuai Jadwal				
2	Persentase KPU Provinsi Gorontalo KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%
Sasaran Program 3. Terwujudnya Dukungan Logistik KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan				
3	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%
Sasaran Program 4. Meningkatnya Kapasitas SDM KPU Provinsi Gorontalo yang Berkompeten				
4	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai KPU Provinsi Gorontalo terhadap Standar Kompetensi	90%	90%	100%
Sasaran Program 5. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Gorontalo				
5	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai KPU Provinsi Gorontalo yang berfungsi dengan Baik	49%	49%	100%
Sasaran Program 6. Terwujudnya Keputusan KPU Provinsi Gorontalo serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan				
6	Persentase keputusan yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%
Sasaran Program 7. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Gorontalo				
7	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Gorontalo	Baik	Cukup Plus	Cukup Plus
8	Reviu Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo	Baik	Cukup Plus	Cukup Plus

Dari tabel diatas ini dapat dilihat bawah 7 (Tujuh) sasaran Program dan 8 (delapan) indikator Program Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo terealisasi dengan baik dan cukup memuaskan, karena melaksanakan kegiatan rutin APBN setiap tahunnya, walaupun beberapa indikator kinerja reuiu laporan keuangan dan nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU belum mencapai target.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Adapun analisis dan evaluasi capaian kinerja sekretariat KPU Provinsi Gorontalo yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo pada tahun 2018 dalam sasaran program dan indikator program adalah sebagai berikut:

SASARAN 1

TERWUJUDNYA DATA PEMILIH KPU PROVINSI GORONTALO YANG TERKINI

Persentase KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu

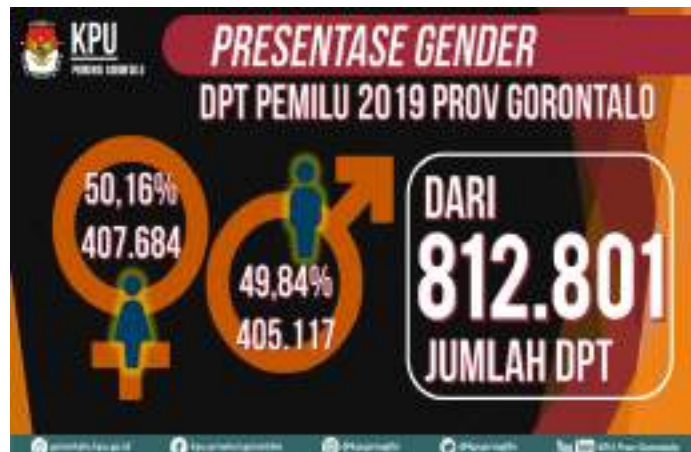
Pemutakhiran data pemilih merupakan tahapan strategis dalam setiap pemilu/pemilihan karena output yang dihasilkan adalah daftar pemilih yang menjamin hak warga negara masuk dalam daftar pemilih sesuai dengan syarat menjadi pemilih.



Selain itu, digunakan sebagai bahan perencanaan penyusunan logistik pemilu/pemilihan untuk digunakan dalam pemungutan suara. Memilih merupakan

hak politik warga negara yang dilindungi oleh undang-undang, agar hak pilih warga negara tersebut benar-benar dapat digunakan pada saat pemilu/pemilihan. Proses pemutakhiran data merupakan pengadministrasian awal yang menentukan kualitas penyelenggaraan pemilu/pemilihan. Undang-undang telah mengamanatkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pengadministrasian pendaftaran pemilih dengan memperhatikan aspek akurasi, komprehensif dan mutakhir. Berdasarkan ketiga aspek tersebut diharapkan kualitas daftar pemilih dapat menjamin hak pilih setiap warga negara.

Indikator kinerja dari sasaran strategis terwujudnya data pemilih yang terkini adalah mengukur prosentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo memutakhirkan data pemilih tepat waktu selang tahun 2018. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 17



huruf I disebutkan kewajiban KPU Provinsi melakukan pemutakhiran dan memelihara data secara berkelanjutan dengan memutakhirkan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu penentu keberhasilan setiap penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan adalah keakuratan dan ketepatan daftar pemilih, makin berkualitas

daftar pemilih maka dianggap penyelenggaraan pemilu semakin baik, karena daftar pemilih menentukan hak konstitusi warga negara untuk memilih di TPS.

Disamping itu, pembersihan data pemilih dalam arti setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih hanya terdaftar satu kali dalam daftar pemilih, sehingga tidak ditemukan pemilih ganda dalam daftar pemilih. apabila daftar pemilih masih ditemukan ganda yang akan mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih.

Selain bersihnya pemilih ganda yang menyebabkan daftar pemilih berkualitas, hal lainnya adalah pembersihan data pemilih yang meninggal dunia, pindah domisili, alih status TNI/POLRI dan pemilih dibawah umur, apabila indikator persyaratan pemilih ini dapat dibersihkan atau tertata dengan baik maka rumusan partisipasi pemilih semakin baik.

Pemutakhiran data pemilih pada pemilihan umum serentak tahun 2019 dengan target capaian dalam perjanjian kinerja sebagaimana tabel dibawah :

Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu pada tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja Program	Realisasi 2015 (%)	Realisasi 2016 (%)	Realisasi 2017 (%)	2018		Target 2019 (%)	Capaian Realisasi (%)
					Target (%)	Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	19
1	Persentase KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100	100

Sedangkan kinerja dalam indikator capaian persentase KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota dalam memutakhirkan data pemilih tepat waktu diwujudkan dengan ketepatan waktu dalam melakukan tahapan pemutakhiran data pemilih maupun kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, sehingga mencapai 100 persen realisasi fisik. Proses panjang dalam pemutakhiran data pemilih yang membutuhkan energi, keseriusan bahkan perhatian terhadap pengelolaan terhadap data pemilih. ada sedikit perubahan regulasi terkait data pemilih dimana setelah ditetapkan daftar pemilih tetap. Namun, adanya masukan dari peserta pemilu dan badan pengawas pemilu terhadap daftar pemilih, sehingga perbaikan daftar pemilih dirubah atau diperbaiki sampai dua kali yang menghasilkan rekapitulasi daftar pemilih tetap hasil perbaikan dua (DPTHP2) pada pemilihan umum tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.4 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil perbaikan 2 KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

NO	NAMA KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH KEC	JUMLAH DESA/ KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH DPTHP-2		
					L	P	L+P
1	Kabupaten Gorontalo	19	205	1.148	141.818	142.574	284.392
2	Kabupaten Boalemo	7	82	400	51.334	49.909	101.253
3	Kabupaten Pohuwato	13	104	405	50.367	49.472	99.839
4	Kabupaten Bone Bolango	18	165	466	55.705	56.342	112.047
5	Kabupaten Gorontalo Utara	11	123	400	41.396	40.813	82.209
6	Kota Gorontalo	9	50	544	64.487	68.574	133.061
TOTAL		77	729	3.363	405.117	407.684	812.801

Data rekapitulasi tersebut diatas, digunakan dalam pemilihan umum DPR, DPD, DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Selanjutnya sejalan dengan hal pemutakhiran maka, setiap tahunnya KPU

Provinsi Gorontalo melakukan pemutakhiran yang berkelanjutan, baik dalam proses tahapan pemilihan maupun tidak adanya pemilu/pemilihan. Pasca penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019, KPU Provinsi Gorontalo telah melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dengan melakukan rapat koordinasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Se-Provinsi Gorontalo bersama unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten/Kota Divisi Perencanaan Data, unsur Dinas DKCS Kabupaten/Kota dan Operator Sidalih KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo, unsur partai politik dan jajaran lembaga pemasyarakatan yang ada di wilayah Provinsi Gorontalo.

**ALUR / PROSES PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**



Untuk data pemilih tetap pada pilkada serentak tahun 2018 Kabupaten Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo sebagaimana tabel dibawa ini:

NO	NAMA KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH KEC	JUMLAH DESA / KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH DPTHP-2		
					L	P	L+P
1	Gorontalo Utara	11	123	257	41.609	40.784	82.393
2	Kota Gorontalo	9	50	258	61.470	65.810	127.280
TOTAL		20	173	515	103.079	106.594	209.673

SASARAN 2

TERWUJUDNYA TAHAPAN PEMILU/ PEMILIHAN KPU PROVINSI GORONTALO SESUAI JADWAL

Persentase KPU Provinsi Gorontalo KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal

Tahapan pemilu 2019 yang cukup panjang yang dimulai dari awal tahun tahun 2018 yang berakhir tahun 2019 dengan tiga tahapan utama mulai dari tahapan persiapan pemilu, pelaksanaan pemilu dan tahapan penyelesaian pemilu.

Pada dasarnya setiap tahapan yang dilaksanakan berjalan dengan semestinya sesuai jadwal yang ditetapkan.

Adapun indikator sasaran ini adalah persentase KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan



pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal tahapan. Indikator ini untuk mengukur ketepatan tahapan pemilu yang ditopang dengan kegiatan antara lain pembentukan badan penyelenggara adhock, dana kampanye pemilu, verifikasi syarat dukungan perseorangan calon anggota DPD pemilu, verifikasi partai politik peserta pemilu, sosialisasi kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat), publikasi Informasi pemilu, pendidikan pemilih kepada daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi dan daerah rawan konflik/bencana, penataan dan penetapan daerah pemilihan pemilu, calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terseleksi pemilu, calon anggota DPD terseleksi pemilu, kampanye pemilu calon anggota DPR, DPD dan DPRD, supervisi/monitoring/bimbingan teknis penyelenggaraan pemilu, sarana dan prasarana keperluan pemilu, sosialisasi penyelenggaraan pemilu, publikasi pemilu, dan pendidikan pemilih pemilu.

Supervisi dan monitoring pemilu 2019 dan pemilihan kepala daerah Kabupaten Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo Tahun 2018, untuk mengukur tingkat capaian kinerja tahapan pemilu tepat waktu dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.7 Pengukuran kinerja terhadap Persentase KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku pada tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja Program	Realisasi 2015 (%)	Realisasi 2016 (%)	Realisasi 2017 (%)	2018		Target 2019 (%)	Capaian Realisasi (%)
					Target (%)	Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100	100	100	100	100	100	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahapan pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 yang dilakukan di tahun 2018 tidak ada satupun tahapan yang tertunda dan mengalami kendala/permasalahan dengan mencapai 100 persen.

SASARAN 3

TERWUJUDNYA DUKUNGAN LOGISTIK KPU PROVINSI GORONTALO DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU /PEMILIHAN

Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu

Pengelolaan logistik pemilu adalah salah satu tahapan yang paling signifikan dan menentukan sukses tidaknya penyelenggaraan suatu pemilihan, tanpa dukungan logistik pemilu tidak akan berjalan secara efektif efisien bahkan tidak akan terlaksana tepat waktu tahapan pemungutan suara pemilu/pemilihan. tahapan pengelolaan logistik pemilu diawali dengan perencanaan, pemetaan kebutuhan logistik yang menganalisis tempat pemungutan suara (kondisi

geografis dan kondisi sosial masyarakat) karena logistik tersebut memuat antara lain surat suara, jenis formulir, dan perlengkapan KPPS lainnya.

Dalam penyusunan logistik pemilu dimulai dari perencanaan, pengadaan dan pendistribusiannya sampai di KPPS. Di Provinsi Gorontalo proses pengadaan dan distribusi logistik

dilakukan secara transparan dan melibatkan aparat keamanan dalam pendistribusiannya, sedangkan logistik yang diadakan dan didistribusikan pada



pemilu 2019 di tahun 2018 sebagian diadakan oleh KPU RI sebagian diadakan oleh KPU Provinsi dan lainnya diadakan oleh KPU Kabupaten/Kota. adapun kelengkapan jumlah dan jenis logistik yang diadakan selang tahun 2018 seperti gambar di bawah ini:

Untuk lebih jelasnya peningkatan pengelolaan logistik pemilu/pemilihan sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.8

Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu pada tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja Program	Realisasi 2015 (%)	Realisasi 2016 (%)	Realisasi 2017 (%)	2018		Target 2019 (%)	Capaian Realisasi (%)
					Target (%)	Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100

Dari tabel diatas terlihat jelas bahwa tercapai target dalam pengadaan logistik setiap pemilu/pemilihan pada tahun 2015, 2016,2017 dan 2018 KPU Provinsi Gorontalo sangat memperhatikan kualitas, jenis dan mutu yang sesuai standar nasional yang telah diatur oleh KPU RI dalam ketentuan peraturan KPU dan surat keputusan KPU RI. selain itu dalam hal pendistribusian juga dilakukan dengan perencanaan jadwal yang matang, dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan jarak tempuh, lokasi yang rawan seperti berbukit, pegunungan dan kepulauan, sehingga pendistribusian logistik dapat dilakukan secara tepat waktu.

Keberhasilan pendistribusian logistik tepat waktu dan berkualitas pada pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dilakukan dengan berbagai kegiatan berupa kegiatan rapat/rakor berkaitan dengan data kebutuhan anggaran logistik pemilu/pemilihan, pengelolaan data, dokumentasi kebutuhan

pengadaan, pendistribusian, pengelolaan administrasi dan fasilitas pengadaan logistik pemilu

SASARAN	4
----------------	----------

MENINGKATNYA KAPASITAS SDM KPU PROVINSI GORONTALO YANG BERKOMPTEN

Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai KPU Provinsi Gorontalo Terhadap Standar Kompetensi

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan seleksi komisioner Provinsi untuk periode 2018 – 2023, KPU Kabupaten Gorontalo, KPU Kabupaten Boalemo, KPU Kabupaten Pohuwato dan KPU Kabupaten Bone Bolango. sedangkan seleksi komisioner Gorontalo Utara periode 2019 - 2024 yang kegiatannya



berjalan sesuai dengan tahapan, bagi penyelenggara adhoc pemilihan kepala daerah Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo tahun 2018 juga dilakukan bimbingan

teknis oleh KPU Kabupaten/Kota terhadap apa yang menjadi tugasnya berkaitan dengan teknis kepemiluan, sehingga dalam pelaksanaan tahapan diharapkan menjadi penyelenggara adhoc yang profesional dan terampil dibidangnya.

Selain itu, KPU sampai jajaran ke bawah telah merekrut penyelenggara adhoc pemilu anggota panitia pemilihan Kecamatan dan panitia pemungutan suara yang tersebar di 6 (enam) Kabupaten/Kota di 77 Kecamatan dan 729

desa/kelurahan, adapun jumlah penyelenggara pemilu sesuai tingkatan di Provinsi Gorontalo sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.9 Rekap Jumlah PPS dan PPK Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten/Kota Se – Provinsi Gorontalo

NO	KAB/KOTA	KPU	PPK		PPS	
			KECAMATAN	JUMLAH PPK	KELURAHAN/DESA	JUMLAH PPS
1	PROVINSI GORONTALO	5				
2	KAB. BOALEMO	5	7	21	8	246
3	KAB. BONE BOLANGO	5	18	54	1	495
4	KAB. GORONTALO	5	19	57	2	615
5	KAB. GORONTALO UTARA	5	11	33	1	369
6	KAB. POHUWATO	5	13	39	1	312
7	KOTA GORONTALO	5	9	27	5	150
TOTAL		35	77	231	7	2187

Indikator kinerja dari sasaran ini adalah persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi, adapun pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.10 Pengukuran Kinerja Terhadap persentase kesesuaian kompetensi pegawai KPU Provinsi Gorontalo terhadap standar kompetensi pada tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja Program	Realisasi 2015 (%)	Realisasi 2016 (%)	Realisasi 2017 (%)	2018		Target 2019 (%)	Capaian Realisasi (%)
					Target (%)	Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai KPU Provinsi Gorontalo terhadap standar kompetensi	90	90	90	90	90	90	100

Dari tabel tersebut diatas, terlihat bahwa persentase realisasi tercapai 90 persen dari yang ditargetkan, sehingga persentase capaian realisasi mencapai 100 persen. dalam hal pemetaan kompetensi pegawai pada tahun 2018, dimana untuk mengukur data base kepegawaian setiap bulannya KPU Kabupaten/Kota melaporkan ke KPU Provinsi Gorontalo nominatif kepegawaian, yang mana perubahan perkembangan data base kepegawaian tersebut disampaikan ke KPU RI. selain pengelolaan data base kepegawaian peningkatan bidang SDM menjalankan penilaian kinerja SDM melalui rapat tim penilaian serta melakukan bimbingan teknis dalam mendukung tahapan pemilu.



Pada tahun 2018 KPU Provinsi Gorontalo meraih penghargaan di bidang SDM terbaik 1 (satu) kategori tertib administrasi dalam pelaporan penegakan disiplin dan pembinaan SDM

Hal lain juga dilakukan KPU Provinsi Gorontalo adalah melakukan penataan organisasi berupa penyeragaman ASN yang bekerja di Sekretariat KPU seluruh Indonesia dengan komposisi 35 ASN untuk Satker Provinsi dan 17 untuk satker Kabupaten/Kota.



Pembinaan SDM senantiasa dilakukan guna meningkatkan kinerja aparatur sipil negara dilingkungan KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota, sehingga aparatur sipil negara yang bekerja di KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota, menjadi aparatur yang handal dan siap melaksanakan tugasnya dengan baik dan profesional, sedangkan kegiatan pelaksanaan dokumen kepegawaian melakukan berupa updating setiap bulan daftar nominatif kepegawaian dan kenaikan pangkat 2 periode setiap tahun.

SASARAN 5

TERWUJUDNYA DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA GUNA MENINGKATKAN KELANCARAN TUGAS KPU PROVINSI GORONTALO

Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai KPU Provinsi Gorontalo yang berfungsi dengan Baik

Sasaran Program terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Gorontalo, dilakukan berupa belanja modal sarana dan prasarana sedalam menunjang terlaksananya seluruh tugas maupun tahapan pemilu dan pemilihan, pengadaan sarana dan prasarana, tentunya mengacu pada kaidah dan norma standar pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Sasaran ini diwujudkan dengan Indikator kinerja persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai KPU Provinsi Gorontalo yang berfungsi dengan baik. Adapun pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.11 Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai KPU Provinsi Gorontalo yang berfungsi dengan baik pada tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja Program	Realisasi 2016 (%)	Realisasi 2017 (%)	2018		Target 2019 (%)	Capaian Realisasi (%)
				Target (%)	Realisasi (%)		
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai KPU Provinsi Gorontalo yang berfungsi dengan baik	50	50	49	49	49	100

Capaian indikator kinerja terlihat dari tahun 2016 hingga tahun 2018 tercapai persentase realisasi fisik sebesar 100 persen. hal ini dilakukan dengan pengadaan alat penunjang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), sehingga bagi masyarakat yang membutuhkan informasi terkait dengan Kepemiluan dapat terlayani dan terlaksana dengan baik oleh PPID KPU Provinsi Gorontalo.

SASARAN 6

TERWUJUDNYA KEPUTUSAN KPU PROVINSI GORONTALO SERTA PENDOKUMENTASIAN INFORMASI HUKUM, SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Persentase keputusan yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU

Pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 KPU Provinsi Gorontalo menyusun rancangan juknis dari setiap tahapan pemilihan yang merujuk pada peraturan KPU RI yang berkaitan dengan tahapan pemilihan sebagai pedoman pelaksana teknis yang menjabarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum setiap tahapan. Tujuan dibuat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo ini adalah untuk memudahkan pelaksanaan teknis pemilu/pemilihan kepada pelaksana penyelenggara pemilu/pemilihan dari tingkat KPU Provinsi sampai dengan tingkat KPPS.

Adapun indikator kinerja dari sasaran strategis ini adalah persentase rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi



KPU. Adapun pengukuran capaian kinerja terhadap indikator kinerja sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 3.12 Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU pada tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja Program	Realisasi 2016 (%)	Realisasi 2017 (%)	2018		Target 2019 (%)	Capaian Realisasi (%)
				Target (%)	Realisasi (%)		
1	2	4		5	6	7	8
1	Persentase keputusan yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100	100	100	100	100	100

Keberhasilan indikator ini dilihat dari ketepatan waktu dan materi juknis sesuai kerangka penyusunan regulasi KPU sehingga dikatakan mencapai 100 persen yang diimplementasikan dengan output kegiatan advokasi hukum dan penyelesaian sengketa hukum berupa menyusun daftar inventaris masalah berkaitan dengan sengketa pencalonan sebagai bahan dalam persiapan menghadapi kasus hukum baik dibawahlu dan PTTUN.

Selain itu, KPU Provinsi Gorontalo menyusun juknis sebagai pedoman penyelenggaraan tahapan pemilihan yang selanjutnya dilakukan penyuluhan maupun sosialisasi kepada peserta pemilihan agar memahami mekanisme pelaksanaan serta dapat mempedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku, kegiatan yang menopang indikator ini antara lain rancangan pedoman/juknis penyelenggara tahapan pemilu, penyuluhan

peraturan perundang undangan pemilu dan pemilukada, bantuan hukum penyelesaian kasus hukum pemilu.

SASARAN 7

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KINERJA KPU PROVINSI GORONTALO

Nilai Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja dan Reviu Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga negara yang secara langsung mengelola pemilu/pemilihan dalam dukungannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dalam penggunaan anggaran negara setiap kementerian dan lembaga negara berkewajiban dalam hal pertanggungjawaban keuangan dan kinerja suatu lembaga. Oleh karena itu pada tahun 2018, KPU Provinsi Gorontalo menyampaikan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja sebagai akuntabilitas kepada publik.

Sasaran meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU dengan tolak ukur indikator kinerja berupa :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo pada tahun



2018 menyelenggarakan tahapan pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 serta mengelola kegiatan rutin diantaranya dokumen perencanaan anggaran, layanan operasional dan teknologi informasi, laporan pelaksanaan kegiatan, analisis capaian kinerja, sistem aplikasi KPU, dokumen penyusunan anggaran pemilihan, pengelolaan dan penerapan kearsipan, pengelolaan dan penerapan kearsipan, pengelolaan PAW anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan kegiatan tahapan pemilihan.

Pelaksanaan kinerja dan anggaran telah terukur melalui sasaran strategis dan Indikator kinerja yang telah ditargetkan setiap tahunnya dalam rencana strategis Komisi Pemilihan Umum dan dalam setiap tahunnya termuat dalam rencana kinerja tahunan dan Perjanjian Kinerja. Pencapaian realisasi target kinerja dan anggaran dievaluasi oleh instansi di atasnya secara internal dan secara eksternal oleh lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Untuk KPU secara eksternal di evaluasi dan diberi nilai oleh kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dengan target B. sedangkan untuk KPU Provinsi Gorontalo dievaluasi oleh inspektorat KPU RI dan untuk KPU Kabupaten/Kota dievaluasi oleh KPU Provinsi Gorontalo.

Adapun pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.13 Pengukuran Kinerja Terhadap Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Gorontalo pada tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja Program	Realisasi 2015 (%)	Realisasi 2016 (%)	Realisasi 2017 (%)	2018		Target 2019 (%)	Capaian Realisasi (%)
					Target (%)	Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kpu Provinsi Gorontalo	-	-	-	B	Cukup Plus	B	Cukup Plus

Dari tabel diatas terlihat bahwa KPU Provinsi Gorontalo belum pernah dilakukan evaluasi secara berjenjang maupun lembaga pemerintah berwenang sehingga dalam hal penilaian akuntabilitas kinerja melalui laporan kinerja Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo belum dapat dicapai, namun hal ini tidak menjadi kendala untuk menyampaikan laporan setiap tahunnya sebagai wujud akuntabilitas kinerja instansi pemerintah / lembaga, KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota setiap tahunnya menyusun laporan kinerja dan perjanjian kinerja.

2. Reviu Laporan Keuangan

Sebagai bentuk akuntabilitas keuangan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk mewujudkan pertanggungjawaban yang transparan serta akuntabel dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. KPU Provinsi Gorontalo dan jajaran penyelenggara pemilu setiap tahun berusaha untuk dapat merealisasikan anggaran sebesar minimal 95 % dalam

target nasional dan realisasi fisik sebesar 100 persen dengan target secara nasional opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Oleh karena itu dalam mewujudkan sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Provinsi Gorontalo, dilakukan reviu atas laporan keuangan yang dilaporkan melalui rekonsiliasi ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan simak BMN ke KPKNL Provinsi Gorontalo. Kegiatan yang mendukung sasara ini adalah layanan pembinaan perbendaharaan KPU, laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemilu, layanan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, layanan perkantoran, laporan persediaan stock opname dan laporan hasil reviu laporan keuangan.

Adapun perbandingan capaian pengukuran indikator kinerja dari reviu laporan keuangan KPU Provinsi Gorontalo sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 3.14 Pengukuran Kinerja Terhadap Reviu Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo pada tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja Program	Realisasi 2015 (%)	Realisasi 2016 (%)	Realisasi 2017 (%)	2018		Target 2019 (%)	Capaian Realisasi (%)
					Target (%)	Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Reviu Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Cukup Plus	Baik	Cukup Plus

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa KPU Provinsi Gorontalo dalam pengelolaan keuangan pada tahun anggaran 2018 dapat mencapai target. hal ini dilihat dari tidak ada catatan rekomendasi perbaikan laporan keuangan hasil reviu laporan keuangan dari inspektorat KPU RI.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada tahun 2018 KPU Provinsi Gorontalo mengelola anggaran APBN yang diberikan dari KPU RI. Adapun anggaran APBN sebesar Rp. 17.489.352.000,- (tujuh belas milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dari anggaran tersebut KPU Provinsi Gorontalo mengembalikan dana sebesar Rp. 965.916.790,- (sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah)

Realisasi dari anggaran dalam DIPA KPU Provinsi Gorontalo Nomor : SP.DIPA-076.01.2.654556/2016 Tanggal 07 Desember 2016 untuk anggaran APBN murni mencapai 94,47 % sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel 3.15 Realisasi APBN Murni
KPU Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2018**

NO	NAMA SATKER	PAGU		REALISASI	SISA PAGU	PROSENT ASE (%)	KET
		AWAL	REVISI				
1	2	3	4	5	6=(4-5)	7=(5/4*100)	8
1	KPU PROVINSI GORONTALO	15.622.273.000	17.489.352.000	16.523.435.210	965.916.790	94,47	APBN MURNI tahun 2018

Pengelolaan anggaran sejak Tahun 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 alokasi anggaran yang diberikan oleh KPU RI melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dapat dilihat sebagaimana tabel perbandingan dibawah ini :

Tabel 3.16 Perbandingan Pagu dan Realisasi APBN Murni dan HIBAH APBD Tahun Anggaran 2015 - 2018 KPU Provinsi Gorontalo

NO	TAHUN ANGGARAN	SUMBER DANA	PAGU	REALISASI	%
1	2015	APBN MURNI	Rp 9.173.930.000	Rp 7.951.618.719	86,68
2	2016	APBN MURNI	Rp 6.403.263.000	Rp 5.995.675.910	93,63
		APBN + HIBAH APBD	Rp 56.335.708.000	Rp 43.156.085.894	76,61
3	2017	APBN MURNI	Rp 7.098.808.000	Rp 6.822.519.807	96,11
		APBN + HIBAH APBD	Rp 42.573.933.000	Rp 42.297.644.061	99,35
4	2018	APBN MURNI	Rp 17.489.352.000	Rp 16.523.435.210	94,47

Upaya pencapaian yang dilakukan oleh KPU Provinsi Gorontalo merupakan bentuk kesungguhan dalam mengaktualisasikan visi misi yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, yang bersinergi dengan KPU Kabupaten/Kota, badan adhoc penyelenggara pemilu (PPK dan PPS) serta didukung oleh stake holder pemilu (Partai Politik, Pasangan Calon, Pers, LSM, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat), sehingga pelaksanaan pesta demokrasi di Provinsi Gorontalo dapat dilaksanakan secara maksimal dan anggaran dapat dimaksimalkan sesuai dengan peruntukannya. Adapun akuntabilitas keuangan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.17 Pengukuran Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran KPU Provinsi Gorontalo

NO	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
SASARAN 1. Terwujudnya Data Pemilih KPU Provinsi Gorontalo yang Terkini							
1	Persentase KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	871.750.000	864.484.037	99,17
SASARAN 2. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan KPU Provinsi Gorontalo Sesuai Jadwal							
2	Persentase KPU Provinsi Gorontalo KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	6.665.235.000	6.400.363.427	96,03
SASARAN 3 Terwujudnya Dukungan Logistik KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan							
3	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	239.997.000	233.150.989	97,15
SASARAN 4. Meningkatkan Kapasitas SDM KPU Provinsi Gorontalo yang Berkompeten							
4	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai KPU Provinsi Gorontalo terhadap Standar Kompetensi	90%	90%	100%	2.652.425.000	2.455.119.872	93
SASARAN 5. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Gorontalo							

NO	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai KPU Provinsi Gorontalo yang berfungsi dengan Baik	49%	49%	100%	57.652.000	50.194.663	87.06
SASARAN 6. Terwujudnya Keputusan KPU Provinsi Gorontalo serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan							
6	Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	482.199.000	446.643.423	93
SASARAN 7. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Gorontalo							
7	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPUProvinsi Gorontalo	Baik	Cukup Plus	Cukup Plus	1.717.559.000	1.567.530.579	91.27
	Reviu Laporan KeuanganKPU Provinsi Gorontalo	Baik	Cukup Plus	Cukup Plus	4.802.535.000	4.512.103.226	94
JUMLAH TOTAL					17.489.352.000	16.529.590.216	94,47

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa seluruh kegiatan dan output diatas rata-rata target anggaran, sedangkan untuk target fisik setiap output kegiatan mencapai 100 persen. untuk output belanja pegawai masih terdapat sisa anggaran yang tidak dapat digunakan, karena disesuaikan dengan keberadaan aparatur sipil negara dalam hal pembayaran tunjangan kinerja dan uang makan yang bersifat fluktuatif disesuaikan dengan kehadiran pegawai.

Dalam pencapaian asaran program KPU Provinsi Gorontalo telah berkinerja secara efektif dan efisien pada indikator kinerja sebagai berikut :

1. Persentase KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu, dapat terlaksana sesuai dengan target 100 persen dengan realisasi anggaran sebesar 99,17 persen, dimana pada tahun 2018, KPU Provinsi melakukan tahapan pemutakhiran daftar pemilih pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 sesuai dengan tahapan dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan. Selain itu juga dilakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
2. Persentase KPU/KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan pemilu/ pemilihan sesuai dengan jadwal. Pelaksanaan pembentukan badan penyelenggara adhoc, tahapan pencalonan anggota DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan melakukan supervisi/monitoring/bimbingan teknis penyelenggaraan pemilu. oleh karena itu indikator ini tercapai target kinerjanya 100 persen dengan realisasi keuangan sebesar 96.03 persen.
3. Persentase yang mendistribusikan logistik pemilu/ pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu. Indikator kinerja ini tercapai 100 persen dari yang ditargetkan 100 persen dengan persentase realisasi keuangan 97,15. Hal ini dicapai dengan melakukan pendistribusian logistik secara berjenjang ke KPU Kabupaten/Kota hingga sampai ke lokasi TPS, sesuai dengan tahapan dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo tahun 2018.
4. Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi. Indikator kinerja ini berhasil mencapai target sebesar 90 persen, dengan

persentase realisasi keuangan sebesar 93 persen. capaian ini dimaksimalkan dengan beberapa kegiatan yaitu penataan, pembinaan dan pengelolaan SDM serta ketatalaksanaan SDM.

5. Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik. Capaian indikator ini dilakukan dengan pemenuhan sarana penunjang pejabat pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID), sehingga tercapai realisasi fisiknya sebesar 49 Persen sebagaimana target yang telah ditetapkan dan persentase realisasi keuangan sebesar 87.06 persen.
6. Persentase rancangan peraturan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU. KPU Provinsi Gorontalo telah menyusun beberapa petunjuk teknis sebagai turunan dari peraturan KPU RI yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan tahapan pemilihan dalam bentuk Surat Keputusan KPU Provinsi Gorontalo, sehingga capaian indikator kinerja mencapai 100 persen sesuai target yang telah ditetapkan dengan persentase realisasi keuangan sebesar 93,00 persen
7. Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU. Pencapaian indikator kinerja ini dengan melakukan kegiatan rutin maupun kegiatan tahapan pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dengan capaian target sasaran strategis dan indikator kinerja sesuai dengan target dalam perjanjian kinerja tahun anggaran 2018 KPU Provinsi Gorontalo. Rangkaian capaian target sasaran dan indikator dilaporkan dalam Laporan Kinerja Ketua dan Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo, namun

Laporan Kinerja (LKj) Ketua KPU dan Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo belum pernah dievaluasi, sehingga capaian indikator kinerja belum dapat tercapai. Walaupun penilaian LKj belum dilakukan, tetapi seluruh rangkaian kegiatan untuk tahun anggaran 2018 persentase realisasi anggaran untuk indikator kinerja ini sebesar 91,27 persen

8. Reviu Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo sebagai lembaga negara berkewajiban melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan, KPU Provinsi Gorontalo telah dilakukan reviu atas laporan keuangan yang dilaporkan melalui rekonsiliasi ke Kantor Pelayan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan simak BMN ke KPKNL Provinsi Gorontalo. Hasil Reviu laporan keuangan tidak adanya catatan rekomendasi dari Inspektorat KPU RI, oleh karena itu Indikator kinerja telah mencapai target baik dengan capaian persentase realisasi anggaran sebesar 94 persen.

BAB IV

PENUTUP

Setiap kementerian/lembaga yang menjalankan tugas dan kewenangan yang diamanatkan dalam undang-undang mengharuskan membuat laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban setiap tahunnya, yang sudah barang tentu mengacu pada perjanjian kinerja setiap instansi pada tahun berjalan. Pertanggungjawaban ini, mengarah pada rencana strategi masing-masing lembaga dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang memuat keberhasilan yang diukur dari target capaian yang telah ditetapkan, selain itu melakukan perbandingan setiap tahunnya.

Dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo terurai secara sistematis dalam laporan kinerja yang memuat sasaran strategis dan target indikator kinerja yang akan dicapai selang tahun anggaran 2018. Pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja telah digambarkan dalam realisasi anggaran dan fisik yang telah ditetapkan dalam target perjanjian kinerja Tahun 2018 yang direalisasinya dalam program dan kegiatan KPU Provinsi Gorontalo dalam rangka mencapai visi dan misi.

Untuk capaian visi dan misi telah ditetapkan indikator kinerja utama dalam mendorong capaian dan sekaligus sebagai bahan pengukur keberhasilan yang telah dicapai sesuai target dalam satu tahun anggaran. Selain capaian selang tahun 2018, KPU Provinsi Gorontalo sukses telah melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2019 tanpa ada kendala yang cukup signifikan,

padahal, pada tahun 2018 telah mengalami pergantian komisioner yang bertugas di KPU Provinsi Gorontalo, selain itu, di Provinsi Gorontalo menyelenggarakan pemilihan serentak di Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo, yang berjalan dengan baik dan tertib. tentunya hal ini dibarengi dengan semangat dan kerja keras sehingga membuahkan hasil yang dibuktikan dengan penghargaan yang diraih pada pelaksanaan Pemilu/Pemilihan selang tahun 2014-2019 antara lain :

1. Memperoleh predikat pertama kualitas daftar pemilih pada Pemilu 2014 secara nasional.
2. Memperoleh predikat kedua sosialisasi dan pendidikan pemilih pada Pemilu 2014.
3. Keberhasilan dalam partisipasi pemilih pada Pilkada serentak Tahun 2015 sebesar 80,01 % diatas rata-rata nasional.
4. Pada tahun 2017 mendapat penghargaan dari Bawaslu Republik Indonesia sebagai Penyelenggara Pilkada 2017 terbaik.
5. Dalam hal pembinaan apartur penyelenggara pemilu mendapat terbaik satu kategori tertib administrasi dalam pelaporan penegakan disiplin dan pembinaan SDM

Penguatan sumber daya manusia yang semakin membaik dari tahun ke tahun, dipengaruhi oleh upaya konsolidasi organisasi, koordinasi dan konsultasi. sehingga dapat mewujudkan profesionalitas dalam menjalankan tugas fungsi dan kewenangan yang diamanatkan dalam Undang-undang.

LAMPIRAN 1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Data Pemilih KPU Provinsi Gorontalo yang Terkini	Persentase KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
2	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan KPU Provinsi Gorontalo Sesuai Jadwal	Persentase KPU Provinsi Gorontalo KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
3	Terwujudnya Dukungan Logistik KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
4	Meningkatnya Kapasitas SDM KPU Provinsi Gorontalo yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai KPU Provinsi Gorontalo terhadap Standar Kompetensi	90%
5	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Gorontalo	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai KPU Provinsi Gorontalo yang berfungsi dengan Baik	49%
6	Terwujudnya Keputusan KPU Provinsi Gorontalo serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persentase keputusan yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1	2	3	4
7	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Gorontalo	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Gorontalo	Baik
		Reviu Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo	Baik

PROGRAM

ANGGARAN

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya	Rp.	11.143.365.000,-
Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Rp.	4.478.908.000,-

LAMPIRAN II

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

NO	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Sasaran Program 1. Terwujudnya Data Pemilih KPU Provinsi Gorontalo yang Terkini				
1	Persentase KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%
Sasaran Program 2. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan KPU Provinsi Gorontalo Sesuai Jadwal				
2	Persentase KPU Provinsi Gorontalo KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%
Sasaran Program 3. Terwujudnya Dukungan Logistik KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan				
3	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%
Sasaran Program 4. Meningkatnya Kapasitas SDM KPU Provinsi Gorontalo yang Berkompeten				
4	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai KPU Provinsi Gorontalo terhadap Standar Kompetensi	90%	90%	100%
Sasaran Program 5. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Gorontalo				
5	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai KPU Provinsi Gorontalo yang berfungsi dengan Baik	49%	49%	100%
Sasaran Program 6. Terwujudnya Keputusan KPU Provinsi Gorontalo serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan				
6	Persentase keputusan yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%
Sasaran Program 7. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Gorontalo				
7	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Gorontalo	Baik	Cukup Plus	Cukup Plus
8	Reviu Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo	Baik	Cukup Plus	Cukup Plus

